

PERAIRAN BERMASALAH : TANTANGAN MARITIM DI ASIA PASIFIK

Laksamana TNI Dr. Marsetio¹

Abstract - Asia Pacific is a region with great attractions and also highly dynamic, with its growth and economic pulse that affects economy of the world. High economic growth coupled with regionalism and globalization generates implications the emergence of issues related to maritime security, national borders, disputes on territory rich in resources, environmental issues, transnational organized crimes, natural disasters, and energy and food security. Globalization itself creates new interactions among regional countries as a precondition to solve and face common problems in maritime domain awareness network. Regional Maritime Partnership is a smart choice when regional stability is becoming the goal of all states to maintain regional resilience. Indonesia's position is unique as the link between two regions (Pacific and Indian Ocean) dependent on each other. Indonesia never recedes in providing the drive for regional stability through balancing strategies without becoming entangled in alliances. Indonesian Navy as a component of national strength participates in the application of national strategy into naval strategy and operationalizing it in diplomacy and multilateral exercises to enhance interoperability among navies in Asia Pacific, especially among ASEAN nations.

Keywords: Maritime Challenges, Maritime Security, Maritime Domain Awareness (MDA), Regional Maritime Partnership.

Pendahuluan

Merupakan fakta tidak terbantahkan bahwa ada korelasi langsung antara globalisasi dengan keamanan maritim. Globalisasi yang menekankan pada kelancaran arus barang dan jasa serta didukung oleh arus informasi menuntut terjaminnya keamanan maritim, sebab lebih dari 95 persen arus perdagangan dunia menggunakan domain maritim. Oleh karena itu, setiap *stakeholders* kepentingan maritim, baik aktor negara maupun non negara, dituntut untuk mengembangkan *Maritime Domain Awareness (MDA)*² guna menjamin keamanan maritim³.

¹ Penulis adalah Kepala Staf Angkatan Laut.

² Domain Maritim adalah semua wilayah dan hal-hal yang berada di sekitar, berhubungan, bersebelahan, berbatasan dengan laut, samudera, atau perairan untuk bernavigasi, termasuk aktivitas, infrastruktur, masyarakat, kargo, kendaraan laut, dan sarana serta kegiatan transportasi lain. *Maritime Domain Awareness (Kewasapadaan di Bidang Maritim)* adalah pemahaman efektif tentang segala sesuatu yang berasosiasi dengan domain maritim yang dapat berimplikasi pada keamanan, keselamatan, ekonomi, dan lingkungan. Definisi dari *National Plan to Achieve Maritime Domain Awareness for The National Strategy for Maritime Security*, 2005.

³ Elinor C Sload, *Modern Military Strategy: An Introduction*, (London and New York: Routledge, 2012).

Perairan Indonesia yang seluas dua pertiga kawasan maritim Asia Tenggara merupakan kunci stabilisator kawasan. Situasi keamanan maritim di perairan yurisdiksi Indonesia dapat dijadikan barometer bagi situasi keamanan maritim di Asia Pasifik. Selain berbatasan dengan Samudera Pasifik, Indonesia juga berbatasan dengan Samudera India, sehingga bukan sesuatu yang berlebihan bila Indonesia juga menyatakan diri sebagai warga Samudera Pasifik sekaligus Samudera India.

Dewasa ini, kawasan maritim Asia Tenggara yang terletak di antara kedua samudera tersebut menghadapi tantangan keamanan yang cukup signifikan. Selain dihadapkan pada konflik antar negara seperti sengketa Laut Cina Selatan, wilayah ini juga menghadapi tantangan keamanan non tradisional, seperti *Transnational Organized Crimes* (TOC). Pada pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan di Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon menyebutkan bahwa di satu sisi ancaman TOC semakin meningkat, namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerja sama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman TOC tersebut.

Kombinasi kedua tantangan tersebut menuntut kerja sama yang semakin erat antar negara-negara di kawasan, karena era globalisasi berimplikasi pula pada interdependensi keamanan antar negara. Tulisan ini akan membahas tentang tantangan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara yang sudah dinilai sebagai *common regional threats* beserta solusi yang ditawarkan dari perspektif kepentingan nasional Indonesia.

Globalisasi dan Regionalisme

Kawasan Asia Tenggara dihadapkan pada sejumlah tantangan keamanan non tradisional yang pada dasarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari isu global. Mengutip James Dougherty, isu global adalah pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah, dilema-dilema dan tantangan-tantangan yang berkaitan erat dengan kebutuhan-kebutuhan dasar dari keamanan perdamaian internasional, keamanan, tatanan, keadilan, kebebasan dan

pembangunan progresif.⁴ Isu-isu global secara umum diklasifikasikan ke dalam diplomasi keamanan, strategis militer dan sosio ekonomi dengan pengertian yang luas.

Munculnya isu-isu global tidak lepas dari integrasi dunia di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Integrasi itu merupakan keniscayaan seiring dengan terjadinya lompatan manusia dalam penguasaan teknologi dirgantara dan telekomunikasi, sehingga ruang, jarak dan waktu dapat dihemat. Dengan adanya globalisasi beserta isu-isu global yang muncul, saat ini nyaris tidak ada lagi entitas negara yang sepenuhnya otonom dan berdaulat seperti di masa lalu. Globalisasi memunculkan suatu bentuk hubungan yang saling tergantung (interdependensi) dan saling keterhubungan (interkoneksi).

Setidaknya terdapat empat indikator yang membuat suatu isu menjadi global.⁵ Pertama, isu memperoleh perhatian dari para elit pembuat kebijakan dan sejumlah besar pemerintah, mencakup beberapa isu penting dan pemerintah terlibat dalam perdebatan publik mengenai isu-isu tersebut. Kedua, isu memperoleh peliputan secara terus menerus dalam pers dunia. Ketiga, isu menjadi subyek studi, penelitian, perdebatan secara serius dan terus-menerus oleh kelompok-kelompok profesional di dunia internasional. Keempat, isu nampak dalam agenda atau perdebatan-perdebatan tentang agenda organisasi-organisasi internasional.

Terdapat pula empat kriteria mengapa suatu isu menjadi isu-isu global.⁶ Pertama, mempunyai dampak yang signifikan terhadap semua orang. Kedua, melintasi batas-batas nasional atau bersifat transnasional. Ketiga, relatif menetap dan memerlukan tindakan jangka panjang. Keempat, saling keterhubungan antar negara, baik dalam satu kawasan maupun luar kawasan.

Globalisasi memiliki benang merah pula dengan regionalisme, dimana kerja sama kawasan adalah tema utama yang diusung. Termasuk pula di kawasan Asia Tenggara, di mana ASEAN kini tengah bertransformasi menuju ASEAN *Community* yang diharapkan terwujud pada 2015. ASEAN *Community* terdiri atas tiga pilar, yaitu *politico-security*,

⁴ James E. Dougherty, "The Configuration of the Global System" dalam Boyd, Gavin dan Pentland, Charles, et.al, *Issues in Global Politics*, (London: The Free Press, 1981), hlm.6.

⁵ Budi Winarno, *Isu-isu Global Kontemporer*, (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2011), hlm.18.

⁶ *Ibid*, hlm. 20.

economy dan *social-culture*. Langkah ASEAN untuk mewujudkan ASEAN Community merupakan suatu lompatan besar, mengingat organisasi kawasan Asia Tenggara ini sebenarnya masih berhadapan dengan isu non intervensi.⁷

Diskursus mengenai perkembangan keamanan maritim tidak terlepas dari dinamika globalisasi. Penjelasan mengenai perkembangan kekuatan militer di tiap-tiap negara juga mengarah pada satu upaya merespon perkembangan globalisasi yang mempengaruhi banyak segi kehidupan, termasuk persoalan keamanan maritim. Keamanan maritim telah menjadi isu yang sangat penting dalam diskusi dan pembicaraan para pemimpin dunia.

Jonathan Kirshner mengungkapkan konsekuensi globalisasi bagi keamanan nasional suatu negara yang lebih kepada perubahan *nature of the game*. Hal ini tidak terkait dengan apakah satu negara tetap mempertahankan konsep *traditional state-centric* ataupun negara tersebut justru mengadopsi paradigma *multistate-centric*, atau ketika tujuan-tujuan nasional yang dirumuskan oleh negara tersebut tetap sama dan tidak berubah. Globalisasi menuntut adanya cara-cara baru dalam memperhitungkan bentuk-bentuk tantangan yang datang dari luar dan dari dalam negeri. Dalam pandangan Kirshner tersebut, globalisasi memiliki kemampuan yang memaksa semua pihak untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan baru yang lahir dari proses interaksi masyarakat global.⁸

Ripsman and Paul juga memberikan sumbangan teoritik untuk memahami fenomena global yang terjadi sekarang ini. Menurut keduanya, para pemikir Liberal gagal menangkap kemampuan negara untuk tidak juga meninggalkan pendekatan kalkulasi keamanan tradisional. Sementara para pemikir Realis, meski pada kenyataannya keberadaan negara masih tetap kuat, mereka juga tidak bisa menangkap realita bahwa banyak negara yang berada di kawasan yang stabil pada kenyataannya jauh mendapatkan manfaat dalam hal pengelolaan keamanan nasionalnya ketimbang kawasan yang penuh

⁷Rodolf C. Severino, *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community: Insight From the Former ASEAN Secretary-General*, (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 2006), hlm.85-154.

⁸ Amarulla Octavian, *Militer dan Globalisasi*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm.22-25.

gejolak.⁹ Hal ini telah mendorong negara-negara di dunia untuk membangun satu organisasi regional yang bisa berbagi tanggung jawab di antara negara-negara anggotanya dalam menjawab tantangan yang mungkin muncul mengganggu suatu keamanan nasional dan atau keamanan regional.¹⁰

Bagi Indonesia, beragamnya perspektif dan persepsi dalam memaknai globalisasi dan regionalisme dapat dilihat sebagai sebuah konteks pluralitas yang harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, TNI AL dapat menentukan cara pandang baru seperti apa Indonesia harus melihat dan memaknai globalisasi. Pilihannya bisa mengikuti alternatif-alternatif yang ada, atau justru membangun satu tradisi baru dalam membaca dan memaknai globalisasi dan juga regionalisme itu sendiri.¹¹

Tantangan Keamanan Maritim Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara sebagai suatu wilayah yang strategis juga menghadapi sejumlah tantangan maritim. Untuk menghadapi tantangan itu, dibutuhkan kerja sama yang bukan saja melibatkan negara-negara ASEAN, tetapi juga mitra-mitra ASEAN seperti negara-negara non ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Regional Forum (ARF). Setidaknya terdapat delapan tantangan maritim kawasan Asia Tenggara dari perspektif Indonesia.

Pertama, rivalitas terhadap sumberdaya alam dan kompetisi perdagangan melalui laut. Sebagai contoh adalah sengketa Laut Cina Selatan, dimana dalam sengketa tersebut negara-negara yang terlibat pada dasarnya memperebutkan sumberdaya alam dan sekaligus memperkuat *prestige* masing-masing. Sifat alamiah dari sengketa itu adalah penafsiran sepihak terhadap UNCLOS 1982 dan klaim-klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan berdasarkan alasan-alasan sejarah, pendudukan dan hukum laut¹². Situasi menjadi

⁹ Steven Lamy, "Contemporary, Mainstream Approaches: Neorealism and Neoliberalism", dalam John Baylis, & Steve Smith, et.al, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Third Edition*, (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm.211.

¹⁰ *Ibid*, hlm.32-33.

¹¹ *Ibid*, hlm.37-40.

¹² Ralf Emmers, "Maritime Disputes in the South China Sea: Strategic and Diplomatic Status Quo", dalam Kwa Chong Guan & John K Skogan, et.al, *Maritime Security in Southeast Asia*, (London: Routledge, 2007), hlm.50-52.

lebih rumit karena wilayah sengketa itu juga merupakan jalur pelayaran internasional, sehingga negara-negara non pengklaim seperti Amerika Serikat, Jepang, dan India juga berkepentingan terhadap perairan tersebut.

Kedua, sengketa batas maritim. Beberapa negara Asia Tenggara belum menyepakati wilayah perbatasan maritim dengan negara tetangganya. Untuk menghadapi sengketa tersebut, dituntut kehatian-hatian setiap negara dalam mengelola sengketa agar tidak bereskalasi menjadi konflik yang justru dapat berbalik memberikan kontribusi negatif terhadap stabilitas kawasan.

Ketiga, keamanan pelayaran. Isu keamanan pelayaran di kawasan Asia Tenggara menjadi perhatian tersendiri karena wilayah ini mempunyai beberapa *chokepoints* strategis internasional. Selain itu, kegiatan ekonomi Asia Tenggara dengan kawasan lain di Asia Pasifik maupun dunia bertumpu pada transportasi laut. Wajar jika kondisi tersebut memprioritaskan isu keamanan pelayaran menjadi kepentingan bersama dalam keamanan kawasan.

Keempat, keamanan lingkungan maritim. Agenda lingkungan kini menjadi salah satu fokus utama dalam keamanan nasional dan keamanan regional seiring dengan penambahan penduduk dunia yang berpengaruh terhadap ketersediaan sumberdaya alam. Eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek pengendalian dan pemeliharaan menyebabkan kualitas lingkungan semakin tergerus dan kini bahkan memasuki zona kritis. Isu lingkungan di laut termasuk pemanasan global yang mengancam keberadaan pulau-pulau kecil yang banyak bertebaran di kawasan Asia Tenggara.

Kelima, TOC. Negara-negara kawasan Asia Tenggara kini menghadapi pula tantangan TOC, seperti pembajakan, perompakan, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata ringan dan *illegal imigrant*. Wilayah Asia Tenggara yang sebagian besar adalah wilayah perairan menempatkan faktor pengamanan terhadap wilayah perbatasan sebagai suatu tantangan besar tersendiri, di mana panjangnya wilayah perbatasan menjadi celah bagi pelaku TOC untuk melakukan aksinya.

Keenam, bencana alam. Kawasan Asia Tenggara kepulauan yaitu Indonesia dan Filipina sangat rawan terhadap bencana alam, baik gunung berapi, gempa bumi, tsunami

maupun topan. Dalam satu dekade terakhir, kawasan Asia Tenggara telah dilanda dengan sejumlah bencana alam berskala besar dengan korban lebih dari 200.000 jiwa. Untuk menghadapi bencana tersebut, dibutuhkan kerja sama erat antar negara karena kasus tsunami Aceh 2004 memberikan pelajaran berharga bahwa bencana berskala besar tidak dapat hanya diatasi oleh satu negara saja.

Ketujuh, keamanan energi. Isu keamanan energi memiliki korelasi langsung dengan eksistensi suatu negara, sebab energi adalah pendorong utama berbagai bidang, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan. Isu keamanan energi membutuhkan pengelolaan global dan regional yang tepat dan memadai, agar isu tersebut tidak berkontribusi negatif terhadap stabilitas perdamaian. Sebab konsentrasi persebaran energi dunia yang tidak merata merupakan sumber konflik laten apabila energi terus digunakan sebagai senjata untuk bersaing dengan negara lain.

Kedelapan, keamanan pangan. Keamanan pangan kini menjadi kepedulian bersama negara-negara di dunia seiring dengan terjadinya perubahan iklim global, yang bukan saja berdampak negatif pada wilayah daratan dunia, tetapi juga pada wilayah lautan dunia. Jumlah produk perikanan yang bersumber dari lautan mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi kebutuhan pangan manusia. Selain itu, terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap sumber pangan di laut pada beberapa wilayah perairan tertentu di kawasan Asia Tenggara juga membutuhkan upaya ekstra pengamanan pangan.

Regional Maritime Partnership

Untuk menghadapi tantangan keamanan maritim kawasan Asia Tenggara, dibutuhkan adanya *Global Maritime Partnership* dengan mengutamakan kerja sama kawasan.¹³ *Regional Maritime Partnership* menjadi pilihan tepat sebab dalam era globalisasi dan regionalisme, berbagai tantangan yang muncul akan lebih efektif dihadapi dalam

¹³Dr. Marsetio, Laksamana TNI, *Developing Regional Naval Cooperation: The Indonesian Navy's Perspective*. Makalah disampaikan pada *International Maritime Security Conference (IMSC) As Part of IMDEX 2013*, Singapura, 15 Mei 2013, hlm. 3; dan Dr. Marsetio, Laksamana TNI, *Peningkatan Kesadaran Bidang Maritim (Maritime Domain Awareness) Melalui Pelestarian Sumberdaya Kelautan Menuju Kemandirian Bangsa*. Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Universitas Hang Tuah, Surabaya, 11 Mei 2013, hlm.12.

kerangka multilateral dibandingkan dengan bingkai bilateral. Terkait dengan *Regional Maritime Partnership*, terdapat tiga pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam tulisan ini.

Pertama, *what tools are at disposal of the diplomatic community within and beyond the region to work out solutions?* Kedua, *what are the contributions of navies to evolving Asian Maritime relation?* Ketiga, *are there examples from other regions of the world that could serve as a model for advancing cooperation in the maritime area?*

Ketiga pertanyaan itu apabila dicermati sesungguhnya sangat terkait dengan kepentingan nasional Indonesia. Salah satu kepentingan Indonesia di kawasan Asia Pasifik maupun Asia Tenggara adalah stabilitas kawasan. Eksistensi ASEAN yang sangat disokong oleh Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan dan menjaga stabilitas kawasan. Dengan stabilitas kawasan, maka Indonesia dapat membangun kesejahteraan rakyatnya sekaligus mempunyai kemampuan untuk membangun kekuatan pertahanan yang berkesinambungan. Demikian pula sebaliknya, *national resilience* di Indonesia dapat berkontribusi positif terhadap *regional resilience* pada lingkup Asia Tenggara.

Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia, termasuk mendukung kegiatan diplomasi. Pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia tidak ditujukan untuk mengancam stabilitas kawasan, karena hal demikian sangat bertentangan dengan prinsip fundamental Indonesia. Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap stabilitas kawasan, secara reguler Indonesia menerbitkan Buku Putih Pertahanan yang dapat diakses oleh negara-negara lain.

Pada tingkat regional, komitmen Indonesia terhadap stabilitas kawasan diwujudkan dengan beberapa inisiatif, di antaranya pembentukan ASEAN *Defense Ministers' Meeting* (ADMM) dan ASEAN *Defense Ministers' Meeting Plus Expert Working Group* (ADMM-Plus EWG).¹⁴ Melalui ADMM dan ADMM-Plus EWG, Indonesia bersama negara-negara ASEAN maupun mitra ASEAN menggagas dan mengimplementasikan kerja sama di bidang keamanan maritim, *humanitarian assistance and disaster relief* (HADR), pemeliharaan perdamaian, kontra terorisme dan kesehatan militer. Mulai 2013, ADMM-

¹⁴ Dr. Marsetio, Laksamana TNI, *Peran TNI Angkatan Laut Dalam Mendukung Pemberdayaan Potensi Kelautan Guna Meningkatkan Perekonomian Negara Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional*. Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah Wisuda Pasca sarjana Universitas Khristadwipayana, Jakarta, 21 Agustus, 2013, hlm.10.

Plus EWG akan memasuki fase yang lebih maju berupa *field training exercise* (FTX) pada kelima bidang kerja sama tersebut.

Dalam rangka menghadapi tantangan keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik, Indonesia mempunyai posisi utama yang perlu untuk dipahami oleh seluruh negara di kawasan. Posisi utama itu adalah prinsip *balancing without alliance*¹⁵ yang diimplementasikan dalam bentuk *dynamic equilibrium* yang merupakan pengejawantahan direktif Presiden RI yaitu politik luar negeri yang “*sailing on the turbulence sea*”. Secara singkat, *balancing without alliance* adalah upaya Indonesia untuk menjadi penyeimbang di antara kekuatan-kekuatan besar yang bersaing di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Dalam konteks itu, Indonesia tidak akan menjadi pengikut salah satu dari kekuatan-kekuatan yang tengah bersaing.

Hal itu menjadi alasan mengapa Indonesia menjalin kemitraan strategis (*strategic partnership*) dengan dua kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik saat ini. Sejak 2005, Indonesia dan RRC terikat dalam *Strategic Partnership* yang sejauh ini telah memberikan keuntungan bagi Indonesia. Begitu pula dengan Amerika Serikat, dimana Indonesia menyepakati *Comprehensive Partnership* sejak 2009 yang telah berkontribusi pada kepentingan nasional Indonesia. Semua itu adalah implementasi dari *balancing without alliance*, yang pada dasarnya mengacu pada politik luar negeri bebas dan aktif.

Apabila dikaitkan dengan tantangan keamanan maritim yang dihadapi bersama oleh negara-negara kawasan, Indonesia berpendapat bahwa tantangan tersebut harus dihadapi bersama melalui kerja sama multilateral sebagai bentuk nyata implementasi *Regional Maritime Partnership*. Dalam kerja sama multilateral itu, setiap negara dapat menyiapkan semua sumberdaya yang tersedia guna mengantisipasi delapan tantangan keamanan maritim kawasan. Sumberdaya yang tersedia itu meliputi sumberdaya manusia, perangkat lunak dan Alutsista pertahanan.

Sumberdaya yang tersedia tersebut akan berkontribusi terhadap stabilitas kawasan apabila disiapkan secara tepat guna merespon tantangan yang muncul. Dalam penyiapannya, Indonesia berpandangan bahwa selain persiapan unilateral, dibutuhkan

¹⁵ Vidya Nadkarni, *Strategic Partnerships in Asia: Balancing Without Alliances*, (London and New York: Routledge, 2010).

pula penyiapan multilateral. Oleh karena itu, Indonesia memandang penting adanya latihan bersama negara-negara ASEAN untuk menghadapi tantangan terhadap keamanan maritim.

Terdapat sejumlah alasan mengapa latihan bersama ASEAN di bidang keamanan maritim perlu untuk dilaksanakan. Pertama, interdependensi keamanan. Dalam era globalisasi dan regionalisme saat ini, interdependensi keamanan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Adanya interdependensi keamanan menuntut negara-negara kawasan untuk secara bersama meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan keamanan yang menjadi kepentingan bersama. Di situlah relevansi dari latihan bersama ASEAN di bidang keamanan maritim.

Kedua, *interoperability*. Melalui latihan bersama ASEAN di bidang keamanan maritim, negara-negara ASEAN dapat meningkatkan *interoperability*. Peningkatan tersebut dibutuhkan karena tantangan keamanan maritim bersifat lintas negara, sehingga kerja sama operasional antar aparat keamanan maritim negara-negara ASEAN bersifat mutlak. Selain itu, latihan tersebut akan mengurangi kesenjangan pada tataran taktis antar aparat keamanan maritim ASEAN, sehingga diharapkan mampu menghadapi dinamika sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

Ketiga, kesiapan Angkatan Laut ASEAN. Untuk mencapai kesiapan (*readiness*) Angkatan Laut ASEAN, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui latihan bersama. Melalui latihan bersama, dapat diujicoba bagaimana kesiapan Angkatan Laut ASEAN untuk merespon tantangan keamanan maritim yang muncul. Standarisasi tingkat kesiapan Angkatan Laut ASEAN merupakan salah satu tantangan tersendiri dalam kerja sama antar Angkatan Laut di kawasan Asia Tenggara, sebab tingkat kesiapan antar negara masih berbeda-beda yang dipengaruhi oleh bermacam faktor.

Mengacu pada kondisi aparat keamanan maritim negara-negara Asia Tenggara, tidak dapat dibantah bahwa Angkatan Laut merupakan kekuatan terbesar yang berkontribusi terhadap keamanan maritim kawasan. Untuk itu, dalam rangka menghadapi tantangan keamanan maritim di kawasan, Indonesia memandang pentingnya komitmen bersama yang tinggi pada tingkat Angkatan Laut ASEAN untuk menyiapkan sumberdaya Angkatan Laut. Bentuk nyata dari komitmen itu adalah setiap negara menyiapkan

sejumlah unsur kapal perang yang siap untuk disebarkan menghadapi ancaman keamanan maritim pada sektor perairan yang dinilai rawan dan saling berbatasan dengan negara ASEAN lainnya.

Pada tingkat multilateral, komitmen tersebut telah dipraktekkan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam *Malacca Straits Sea Patrol (MSSP)* yang telah dimulai sejak 20 Juli 2004.¹⁶ Dalam MSSP, keempat negara sepakat untuk menyiapkan sejumlah unsur kapal perang setiap saat untuk berpatroli pada sektor masing-masing di Selat Malaka. Praktek demikian bisa menjadi diperluas dalam konteks ASEAN dengan sejumlah persyaratan. Sebagai contoh, negara-negara ASEAN terkait harus menyepakati di kawasan perairan mana yang dinilai rawan dan selanjutnya memberikan komitmen berupa kemampuan menyiapkan sejumlah unsur kapal perang di wilayah perairan rawan itu setiap saat guna merespon eskalasi di lapangan.

Komitmen ASEAN mengacu pada pengalaman negara-negara Uni Eropa dan NATO dalam merespon ancaman keamanan maritim di Teluk Aden dan perairan Somalia. Sebagai contoh, Uni Eropa membentuk suatu Gugus Tugas yang disebarkan ke kedua wilayah rawan bajak laut itu, dimana negara-negara anggota Uni Eropa menyediakan sejumlah unsur kapalnya untuk beroperasi di bawah komando dan kendali EUNAVFOR.

Walaupun ASEAN dan Uni Eropa tidak dapat dibandingkan *apple to apple* berdasarkan berbagai pertimbangan obyektif, akan tetapi *lesson learned* dari operasi di Teluk Aden dan perairan Somalia dapat menjadi inspirasi bagi ASEAN untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim pada tingkat multilateral. Dengan interdependensi keamanan, sudah bukan saatnya lagi bagi negara-negara ASEAN untuk sekedar berpikir dalam konteks yang sempit.

Di samping latihan bersama Angkatan Laut ASEAN, Indonesia juga memandang penting terselenggaranya *ASEAN Naval Symposium (ANS)*. ANS merupakan wadah bagi Angkatan Laut ASEAN untuk duduk bersama membahas tentang dinamika keamanan maritim kawasan. Eksistensi ANS dibutuhkan karena karakteristik keamanan maritim di

¹⁶Dr. Marsetio, Laksamana TNI. *Regional Interoperability in Managing Maritime Issues the Indonesian Navy Perspective*. Makalah disampaikan pada *The 20th International Seapower Symposium in US Naval War College*, Newport, Rhode Island, USA, 20 Oktober 2011, hlm.4.

kawasan Asia Tenggara memiliki perbedaan dibandingkan dengan kawasan Samudera Pasifik maupun Samudera India. Selain itu, ANS merupakan wujud ketuanrumahan ASEAN di wilayahnya sendiri dan tidak semata menjadi arena kontestasi aktor non ASEAN.

Beberapa gagasan Indonesia untuk merespon tantangan keamanan maritim kawasan Asia Tenggara merupakan sikap Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas kawasan. Bagi Indonesia, kerja sama antar negara guna menjaga stabilitas kawasan merupakan keniscayaan. Sebaliknya, kerja sama tersebut tidak identik dengan pengurangan terhadap kedaulatan negara, sebab dalam era globalisasi dan regionalisme dewasa ini, tidak ada lagi negara yang sepenuhnya otonom dan berdaulat mutlak.

Penutup

Indonesia memandang bahwa dalam era globalisasi dan regionalisme dewasa ini, interdependensi keamanan antar negara merupakan suatu kebutuhan. Begitu pula dalam keamanan maritim dimana MDA menjadi tulang punggung dalam globalisasi. Sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menilai untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang berkembang, mutlak diperlukan *Regional Maritime Partnership*.

Indonesia berpendapat bahwa mengembangkan kerja sama multilateral Angkatan Laut ASEAN juga sangat penting untuk dilakukan. Kepentingan itu didasarkan pada kebutuhan untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang berkembang secara bersama. Angkatan Laut negara-negara ASEAN pada dasarnya telah memiliki modalitas untuk mengembangkan kerja sama multilateral, antara lain yang berbasis pada pengalaman kerja sama pada tingkat bilateral. Kerja sama tersebut harus dibangun di atas kepentingan bersama yaitu stabilitas keamanan kawasan.

Daftar Pustaka

- Dougherty, James E. 1981. "The Configuration of the Global System" dalam Boyd, Gavin dan Pentland, Charles, et.al. *Issues in Global Politics*. London: The Free Press.
- Dr. Marsetio, Laksamana TNI. 2011. *Regional Interoperability in Managing Maritime Issues the Indonesian Navy Perspective*. Makalah disampaikan pada *The 20th International Seapower Symposium in US Naval War College*. Newport, Rhode Island, Amerika Serikat, 20 Oktober 2011.
- Dr. Marsetio, Laksamana TNI. 2013. *Peningkatan Kesadaran Bidang Maritim (Maritime Domain Awareness) Melalui Pelestarian Sumberdaya Kelautan Menuju Kemandirian Bangsa*. Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana Universitas Hang Tuah. Surabaya, 11 Mei 2013.
- Dr. Marsetio, Laksamana TNI. 2013. *Developing Regional Naval Cooperation: The Indonesian Navy's Perspective*. Makalah disampaikan pada *International Maritime Security Conference (IMSC) As Part of IMDEX 2013*. Singapura, 15 Mei 2013.
- Dr. Marsetio, Laksamana TNI. 2013. *Peran TNI Angkatan Laut Dalam Mendukung Pemberdayaan Potensi Kelautan Guna Meningkatkan Perekonomian Negara Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional*. Makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah Wisuda Pasca sarjana Universitas Khristadwipayana. Jakarta, 21 Agustus 2013.
- Emmers, Ralf. 2007. "Maritime Disputes in the South China Sea: Strategic and Diplomatic Status Quo", dalam Guan, Kwa Chong and Skogan, John K, et.al. *Maritime Security in Southeast Asia*. London: Routledge.
- Lamy, Steven. 2007. "Contemporary, Mainstream Approaches: Neorealism and Neoliberalism", dalam John Baylis & Steve Smith, et.al. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Third Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Nadkarni, Vidya. 2010. *Strategic Partnerships in Asia: Balancing Without Alliances*. London and New York: Routledge.
- Octavian, Amarulla. 2012. *Militer dan Globalisasi*. Jakarta: UI Press.
- Severino, Rodolf C. 2006. *Southeast Asia in Search of an ASEAN Community: Insight From the Former ASEAN Secretary-General*. Singapura: Institute of Southeast Asia Studies.
- Sload, Elinor C. 2012. *Modern Military Strategy: An Introduction*. London and New York: Routledge.
- United States. 2005. *National Plan to Achieve Maritime Domain Awareness for The National Strategy for Maritime Security*.
- Winarno, Budi. 2011. *Isu-isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

